

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia merupakan Negara Kepulauan (archipelago) terbesar di dunia. Jumlah pulau mencapai 13.667 pulau serta garis pantai sepanjang 81.497 km², merupakan garis pantai terpanjang di dunia setelah Kanada (Dahuri, et al. 1996). Berdasarkan letak astronomisnya, Negara kepulauan Indonesia ini terletak di katulistiwa diantara 6° Lintang Utara, 11° Lintang Selatan dan 95° Bujur Timur – 141° Bujur Timur, karena secara geografis batas wilayah Indonesia sebelah Utara adalah 6° LU dan disebelah Selatan 11° LS, batas sebelah Barat adalah 95° BT dan batas sebelah Timur 141° BT. Adapun jarak paling jauh antara dua tempat, dengan arah utara ke Selatan adalah 1888 km² secara spesial, wilayah territorial Indonesia membentang dari Barat ke Timur sepanjang 5110 km² dan dari Utara ke Selatan 1888 km².

Berdasarkan letak geografis tersebut, maka wilayah Indonesia beriklim tropis. Iklim tersebut dipengaruhi oleh dua angin musim yaitu angin musim Barat yang bergerak dari Asia ke Indonesia yang membawa curah hujan tinggi dan angin musim Timur yang bergerak dari Australia ke Indonesia yang menyebabkan curah hujan sedikit.

Dengan demikian ada wilayah yang subur dan ada yang kurang subur akibat perbedaan curah hujan tersebut. Dewasa ini teknologi berperan penting yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan seperti pertambangan,

perikanan, pertanian, dan sebagainya. Pemanfaatan teknologi tersebut selain memberi manfaat juga memiliki dampak negatif seperti pencemaran lingkungan.

Negara-negara berkembang seperti Indonesia mengenal proses pembangunan yang tidak memperdulikan segi lingkungan hidup, sehingga sekarang menimbulkan berbagai masalah seperti pencemaran, sulitnya air bersih, dan banjir. Sementara itu efek samping dari proses industrialisasi telah munculkan berbagai produk sekunder berupa bangunan dan limbah industri kedalam sungai, tanah atau udara, sehingga menimbulkan gangguan dan penyakit bagi manusia.

Munculnya pusat-pusat pemukiman yang kumuh dengan berbagai masalah air, sampah, kebisingan dan udara kotor juga merupakan salah satu factor pencemaran yang besar didaerah perkotaan. Sementara itu sejauh dikembangkan wilayah pertanian seperti percontakan sawah baru, maka hutan dengan segala tumbuhan dan binatangnya terancam punah. Dan begitulah seterusnya, sehingga gambaran yang diperlihatkan ialah kemajuan dengan kerusakan, kehidupan dengan kepunahan. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi adalah akibat dari perencanaan dan pelaksanaan dari kebijakan pembangunan yang tidak tepat.

Dalam suasana seperti ini, maka pikiran yang tumbuh dibidang lingkungan hidup ialah bagaimana mengatasi dampak yang merugikan seperti produk sampingan berupa buangan, limbah industri, sampah, kebisingan dan

kepengapan udara, sebaik mungkin agar lingkungan hidup tetap terpelihara dan pembangunan tetap dapat berlangsung.

Pembangunan menempuh jalurnya sendiri dan pembangunan lingkungan berjalan diatas jalurnya sendiri. Hal ini berarti pembangunan dipisahkan dengan pengembangan lingkungan hidup, maka yang terjadi adalah tak ada keterpaduan antara pembangunan atau pengembangan lingkungan. Melakukan yang satu berarti mengorbankan yang lain, mengusahakan pembangunan berarti mengorbankan lingkungan, sebaliknya pengembangan lingkungan berarti mengorbankan pembangunan.

Beberapa sungai besar di Propinsi Lampung seperti Way Sekampung, Way Tulang Bawang, Way Pengubuan, dan Way Terusan mengalami pencemaran akibat pemakaian obat-obatan tanpa pengamanan yang baik. Air yang tercemar dapat dilihat dari klasifikasi berdasarkan kadar PAH.

Tabel 1.1 Klasifikasi Perairan Berdasarkan Kadar PAH

| Penggolongan Air | Kadar PAH (mg/liter) |
|-------------------------|-----------------------------|
| Air tanah | 10 – 50 |
| Air tercemar ringan | 50 – 250 |
| Air tercemar berat | 250 – 1000 |
| Limbah | 1000 – 100000 |

Sumber: Hefni Effendi, Telaah Kualitas Air: Penerbit Kanisius, 2003, Hal. 195.

Disamping itu, sungai mengalami kerusakan akibat pengurusan pasir dan batu, sehingga mengganggu keseimbangan lingkungan. Karena itu ijin pengambilan batu dan pasir perlu memperhatikan kerusakan yang dapat ditimbulkannya.

Pencemaran yang terjadi pada Daerah Aliran Sungai khususnya yang berada di daerah Bandar Lampung baik limbah industri maupun masyarakat akan sangat mempengaruhi potensi daerah pesisir dan kelautan contohnya adalah potensi lestari sumber daya perikanan seperti ikan Plagis dan ikan Demersal akan sangat terganggu dan berkurang.

Ada banyak departemen yang terkait dengan DAS ini yang tujuannya adalah mengusahakan agar "*untuk satu DAS tercipta satu rencana terpadu*". Rencana terpadu ini memperlakukan DAS sebagai satu kesatuan wilayah tata air dan ekosistem yang mencakup berbagai bidang departemen dan aparat pemerintah daerah untuk dikerjakan oleh masing-masing instansi.

Usaha pengembangan Daerah Aliran Sungai (DAS) memerlukan komitmen bersama antara semua pejabat dari berbagai bidang kegiatan untuk menjamin keserasian kerja dalam pengembangan DAS maka perencanaan pengembangan DAS yang mencakup berbagai instansi dikoordinasikan oleh BAPPEDA. Gubernur/Kepala Daerah mengawasi pelaksanaan pengelolaan DAS ditingkat daerah untuk mengatasi timbulnya dampak negatif seperti pencemaran. Kebijakan penanggulangan dampak pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terdahulu menghadapi beberapa permasalahan seperti, persebaran lokasi sumber limbah industri yang sangat luas pada enam daerah pengaliran sungai, sarana dan prasarana seperti transportasi (sarana mobilitas), kelengkapan dan analisis limbah (utamanya laboratorium mobil) belum tersedia, dan peraturan serta perundang-undangan yang ada masih banyak

mengadopsi ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat belum disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah.

Kebijakan dari pemerintah daerah untuk menanggulangi dampak pencemaran sungai didasarkan pada peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Laut.

Dalam PP Nomor 27 Tahun 1999 Tentang AMDAL disebutkan Bahwa setiap usaha dan kegiatan pada dasarnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup yang perlu dianalisis sejak awal perencanaanya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat dipersiapkan sedini mungkin. Bahwa analisis mengenai dampak lingkungan hidup diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang pelaksanaan rencana usaha dan kegiatan yang mempunyai dampak besar dan penting terhadap lingkungan.

Sebenarnya Peraturan Pemerintah tersebut sudah cukup menerangkan bahwa segala kegiatan atau usaha akan menimbulkan dampak bagi lingkungan hidup baik itu besar atau kecil. Jika dicermati lebih lanjut ada beberapa masalah yang menyebabkan pengendalian dampak negatif tidak seperti yang diharapkan yaitu:

1. Masalah dana pengelolaan yang sangat minim.
2. Kurang ketatnya pengawasan limbah oleh instansi terkait.

3. Belum jelasnya penerapan sanksi terhadap industri yang melanggar isi dokumen AMDAL dan Peraturan Perundangan yang berlaku (PP 27/99 tentang AMDAL dan UU 23/97 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup)
4. Rendahnya kepedulian masyarakat sekitarnya terhadap pengelolaan sampah dan lingkungan sekitarnya.¹

Akibat yang ditimbulkannya adalah:

1. Menurunnya daya dukung lingkungan dan kualitas perairan
2. Kotornya kawasan sungai dan pantai
3. Menurunnya kualitas sumber air tanah

Pemerintah daerah dan sebagai pembuat perencanaan seharusnya lebih teliti dalam membuat suatu perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan yang dilakukan seharusnya lebih berwawasan lingkungan. Selain itu pengawasan yang dilakukan terhadap pembuangan limbah industri harus diperketat. Jika hal-hal tersebut kurang mendapatkan perhatian maka pencemaran sungai akan terus berlangsung dan dampak lebih lanjut adalah pencemaran perairan kelautan.

Kebiasaan masyarakat menggunakan sungai untuk mandi, mencuci, kakus, serta menjadi tempat pembuangan sampah rumah tangga, secara sadar atau tidak kebiasaan mereka menjadi salah satu penyebab pencemaran air sungai tidak mengherankan apabila timbul kelangkaan air bersih, penyakit kulit dan lain sebagainya. Terjadinya bencana banjir karena banyaknya timbunan sampah disungai sehingga mengakibatkan meluapnya air sungai.

¹ *Pemerintah Provinsi Lampung Renstra Pesisir, 2000, hal. 34*

Masalah-masalah tersebut banyak dialami oleh masyarakat disekitar Daerah Aliran Sungai yang pada umumnya belum mengerti tentang cara hidup sehat.

Pencemaran tersebut yang harus diantisipasi oleh pemerintah kota Bandar Lampung. Tindakan-tindakan yang diambil untuk mengatasi pencemaran air, salah satunya adalah dengan mengusahakan supaya bahan buangan kota jangan sampai mencemari air, misalnya pencemaran yang harus ditanggulangi adalah pencemaran limbah industri. Cara penanggulangannya ialah dengan pengelolaan produksi yang sedikit mungkin menghasilkan bahan buangan atau bahan buangan harus diproses sedemikian rupa lagi sehingga menghasilkan zat-zat yang tidak menyebabkan pencemaran lingkungan.

Ada industri pengolahan yang beroperasi di daerah Lampung yang begitu saja membuang limbahnya ke sungai terdekat, salah satu kasus yang terjadi di Kota Bandar Lampung adalah pencemaran sungai di daerah Kelurahan Hajimena, perusahaan pengolah karet limbahnya mencemari sungai yang mengalir di daerah tersebut sehingga menimbulkan berbagai penyakit kulit dan bau yang tidak sedap yang mengganggu lingkungan di sekitar wilayah tersebut. Hal tersebut membuktikan bahwa belum berjalannya kebijakan yang dijalankan untuk menanggulangi pencemaran sungai khususnya tentang tingkat baku mutu yang diperbolehkan untuk dibuang ke sungai kurang sesuai dengan kondisi lingkungan sekitar.

Limbah industri merupakan salah satu bahan pencemaran yang berbahaya untuk berada di aliran sungai di Kota Bandar Lampung karena masyarakat yang berada disepanjang Daerah Aliran Sungai masih

mempergunakan air untuk keperluan rumah tangganya sehari-hari seperti mandi, mencuci dan bahkan untuk minum. Masyarakat tersebut sangat rentan dengan berbagai penyakit yang dapat ditimbulkan dari pencemaran aliran sungai seperti penyakit kulit dan diare. Jika masyarakat yang tinggal disepanjang aliran sungai tersebut cukup banyak dan padat maka penyakit tersebut dapat menjadi wabah yang sangat berbahaya yang dapat menelan korban jiwa. Untuk menaggulangi pencemaran-pencemaran tersebut Pemerintah Daerah harus membuat perturan bagi perusahaan agar dapat mengolah air limbahnya secara mekanik maupun secara kimia, perusahaan tersebut harus menyediakan kolam untuk pembersihan air limbah tersebut sebelum dialirkan menuju sungai terdekat, agar tidak menjadi bahan pencemaran sungai.

Salah satu dampak pencemaran adalah sulitnya mendapatkan air bersih disekitar Daerah Aliran Sungai, sebagai akibatnya dari pencemaran limbah perusahaan dan limbah rumah tangga. Akibatnya penyediaan air untuk keperluan hidup makin menjadi masalah. Salah satu pemecahan yang bisa dilakukan adalah dengan pemurnian air baik secara luas maupun secara kecil-kecilan di rumah tangga. Pada pemurnian air secara luas dapat dilakukan dengan pemberian kaporit di aliran sungai yang akan dialirkan untuk kebutuhan masyarakat, untuk pemurnian secara kecil-kecilan masyarakat dapat membuat alat untuk menyaring air yang kotor atau tercemar. Usaha tersebut harus disebar luaskan dengan mengadakan penyuluhan kepada masyarakat di Daerah Aliran Sungai.

Dampak lainnya dari pencemaran sungai adalah banjir. Banjir yang terjadi di wilayah Kota Bandar Lampung beberapa tahun terakhir ini telah menjadi pandangan rutin. Artinya banjir selalu terjadi pada setiap musim hujan dan setiap hujan turun yang mencapai waktu tiga jam. Banjir tersebut secara umum disebabkan oleh meluapnya sungai yang mengalir di wilayah Kota Bandar Lampung, meluapnya aliran sungai tersebut disebabkan dua hal yaitu:

1. Pembuangan sampah ke alur sungai yang menyebabkan penyumbatan aliran sungai
2. Penyempitan alur sungai oleh bangunan penduduk

Dampak banjir yang terjadi di Kota Bandar Lampung dapat berupa dampak negatif secara fisik dan sosial ekonomi. Secara fisik yaitu terjadi kerusakan pada prasarana kota dan menyebabkan terjadinya lingkungan kota yang tidak sehat. Kerusakan terjadi pada prasarana jalan, gorong-gorong, jembatan, listrik, telepon, bangunan umum ataupun rumah tinggal serta perabotannya. Lingkungan menjadi tidak sehat karena tergenang lumpur dan tidak berfungsinya saluran Drainage. Kerusakan karena dampak ini menyebabkan kerugian besar pada pemerintah dan masyarakat.

Usaha-usaha penanggulangan dampak pencemaran sungai diatas oleh pemerintah dijadikan suatu kebijakan khusus untuk mengatasi bahaya pencemaran aliran sungai di Kota Bandar Lampung. Dengan berpedoman pada PP nomor 27 Tahun 1999 Tentang AMDAL dan UU 23 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka akan dibuat dan dilaksanakan Peraturan

Daerah untuk menanggulangi pencemaran Daerah Aliran Sungai di Kota Bandar Lampung. Hal-hal yang dilaksanakan seperti penyuluhan dan penerangan tentang kebersihan dan dampak dari pencemaran kepada masyarakat, pembersihan aliran sungai, penerangan tentang cara pemurnian air dan pengetatan pengawasan kepada pembuangan limbah dari perusahaan yang ada disepanjang aliran sungai di Kota Bandar Lampung. Implementasi dari kebijakan tersebut yang akan menjadi fokus penelitian ini.

B. PERUMUSAN MASALAH

Bertolak dari pemikiran dan latar belakang tersebut maka dilakukan penelitian dan pengkajian dengan permasalahan pokok sebagai berikut:

“Bagaimanakah Implementasi Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 104 Tahun 1999 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Dalam Menanggulangi Pencemaran Sungai Di Bandar Lampung”

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah kota Bandar Lampung didalam menanggulangi pencemaran sungai di Bandar Lampung. Manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara praktis
 - a. Pemerintah

Dapat dijadikan bahan evaluasi bagi tindakan pemerintah kota Bandar Lampung dalam mengendalikan pencemaran sungai.

b. Masyarakat

Kegunaan bagi masyarakat adalah membantu menyampaikan aspirasi masyarakat mengenai masalah pencemaran sungai.

2. Secara akademis

Bagi Pemerintah Dapat memperbaharui pemahaman pemerintah tentang kebijakan pengendalian pencemaran sungai yang terdahulu dengan yang telah direvisi ulang.

D. KERANGKA DASAR TEORI

Kerangka dasar teori merupakan uraian yang menjelaskan variabel-variabel dan hubungan antara variabel berdasarkan konsep definisi tertentu, unsur yang paling besar peranannya. Dalam suatu penelitian adalah teori, karena dengan unsur inilah penulis akan mencoba mengganti permasalahan yang terjadi.

Menurut Muchtar Masud yang dimaksud dengan teori adalah :

“Teori adalah bentuk penjelasan umum yang menjelaskan mengapa suatu fenomena itu terjadi”. Teori merupakan serangkaian konsep-konsep menjadi suatu penjelasan yang menunjukkan bagaimana konsep-konsep itu secara logis berhubungan atau menentukan suatu hipotesa.² Teori juga merupakan ungkapan mengenai hubungan kausal yang logis diantara berbagai gejala atau perubahan variabel dalam bidang tertentu sehingga dapat dipergunakan

² Muchtar Masud, *Disiplin dan Metodologi*, LP3S, Jakarta, 1989, hal. 216

sebagai kerangka berfikir dalam memahami dan menghadapi permasalahan yang timbul dalam bidang tertentu.³

1. Implementasi Kebijakan

Menurut Charles O. Jones mengimplementasikan kebijakan adalah proses mewujudkan program sehingga memperlihatkan hasilnya. Implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dari keseluruhan proses kebijakan, *kamus Websteri* merumuskan secara pendek bahwa *to Implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan) sarana untuk menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu, *to give practical effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu)

Maka implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai sesuatu proses melaksanakan suatu keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah executive atau dekrit presiden).

Proses implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan social yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan yang pada

³ Buntoro Tjokromidjojo, *Teori Strategi Pembangunan Nasional*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1982, hal. 12

akhirnya berpengaruh terhadap dampak baik yang diharapkan (*intended*) maupun yang tidak diharapkan (*spillover/negative effects*).

Implementasi dapat pula dilihat dari sudut kelompok sasaran, misalnya antara manusia dan lingkungan dalam program usaha melestarikan kualitas lingkungan dengan aktivitas pengelolaan lingkungan baru yang dapat dilakukan apabila telah dapat disusun rencana pengelolaan lingkungan untuk menghindarkan dari rusaknya lingkungan.⁴ Kelompok sasaran itu kemungkinan akan lebih memusatkan perhatiannya pada permasalahan apakah pelayan atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah tersebut benar-benar memberikan dampak positif dalam jangka panjang bagi peningkatan aktivitas pengelolaan lingkungan dalam mengatasi permasalahan pencemaran air di kota Bandar Lampung. Pemahaman yang mendalam terhadap sasaran ini amat penting artinya bagi peraturan pemerintah, pemahaman semacam itu akan memungkinkan mereka untuk mengantisipasi umpan balik (*political feedback*) dan peka terhadap asumsi-asumsi perilaku (*behavioral assumption*) yang mendasari penyusunan setiap program. Sebaliknya, peluang keberhasilan dalam mewujudkan hasil akhir yang diinginkan akan semakin besar jika sejak dalam tahap merancang bangun kebijakan (*the policy design stage*) tersebut telah dipikirkan masak-masak berbagai kendala yang mungkin muncul pada saat implementasinya.

⁴ F. Gunarwan Suratmo, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Institut Pertanian Bogor, hal 9

Mazmania dan sabatian telah merumuskan proses implementasi kebijakan ini dengan lebih rinci:

“implementasi adalah pelaksana keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan-keputusan executive yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan mengatur proses implementasinya”.

Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan-tahapan tertentu. Biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksanaan, kesediaan dilaksanakannya keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran, dampak nyata baik yang dikehendaki atau tidak dari output tersebut. Dampak keputusan sebagai dipersepsikan oleh badan-badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting (atau upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan) terhadap undang-undang atau peraturan yang bersangkutan.⁵

a. Analisis Implementasi Kebijakan

- 1) Pada awalnya adalah kebijakan publik, kebijakan publik ini kemudian diterjemahkan kedalam program-program nyata yang ditujukan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan kedalam kebijakan publik. Implementasi kebijakan publik merupakan aktifitas. Pemerintah untuk merealisasikan tujuan-tujuan kebijakan publik, menjadi hasil yang bisa dilihat.

⁵ Dr.Solihin Abdu Wahab, MA, *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta, Bumi Aksara, 1997, hal.59-82

Implementasi kebijakan publik disini merupakan fungsi dari implementasi program dan yang tergantung pada hasil itu sendiri. Stadi implementasi kebijakan publik merupakan usaha untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik serta variabel-variabel yang mempengaruhinya. Dalam usaha untuk memahami pelaksanaan kebijakan publik tersebut perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi atau menentukan pelaksanaan kebijakan publik implementasi. Kebijakan publik banyak ditentukan oleh aparat pelaksana dalam birokrasi namun demikian keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik sesungguhnya juga banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar birokrat namun demikian, disamping dipengaruhi oleh faktor-faktor pelaksana implementasi kebijakan publik juga dipengaruhi oleh isi atau muatan kehidupan publik itu sendiri, dan konteks politik atau karakter rezim serta system politik yang ada. Seperti yang dicontohkan oleh berbagai Negara, dimana penerapan suatu kebijakan publik gagal karena isi kebijakan yang kurang mencerminkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat banyak. Disamping itu juga kegagalan tersebut dikarenakan konteks politik yang ada yang cenderung mementingkan sekelompok orang atau elit ditingkat kekuasaan untuk mengambil keuntungan ekonomi atau kelompoknya dalam kebijakan tersebut. Jadi keberhasilan implemementasi kebijakan publik banyak dipengaruhi oleh isi

(content), kebijakan itu sendiri dan kinerja birokrasi dalam system politik.

- 2) Metode pendekatan dan penelitian kinerja kebijakan implementasi ini merujuk kepada pemikiran **Paul A Sabatier**, yaitu:

“Penelitian dimulai dari suatu keputusan kebijakan pemerintah dan serangkaian kebijakan pemerintah pusat diambil oleh para pejabat”.

Penelitian ini bermula dari keputusan kebijakan publik yang telah diambil oleh para pejabat yang berwenang kemudian menanyakan prosedur pelaksanaan dampak kebijakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan itu dengan kontribusi pengalaman lapangan pelaksanaan kebijaksanaan bagi reformulasi kebijakan tersebut. Analisis kebijaksanaan adalah penilaian dari proses kebijakan yang berkaitan dengan dua hal yaitu, pertama isi kebijakan dan yang kedua lingkungan atas system politik yang ada.⁶

b. Model-model implementasi kebijakan Negara

Sekalipun dalam khasanah ilmu kebijakan Negara atau analisis kebijakan Negara telah banyak dikembangkan model-model atau teori yang membahas tentang implementasi kebijaksanaan, namun beberapa model implementasi kebijaksanaan yang relatif baru dan banyak mempengaruhi berbagai pemikiran atau tulisan para ahli.

⁶ Ulung Pribadi, Drs, *Implementasi Kebijakan Kesehatan*, Program Bidan Desa, Program Pasca Sarjana USM, 1998, Hal. 8

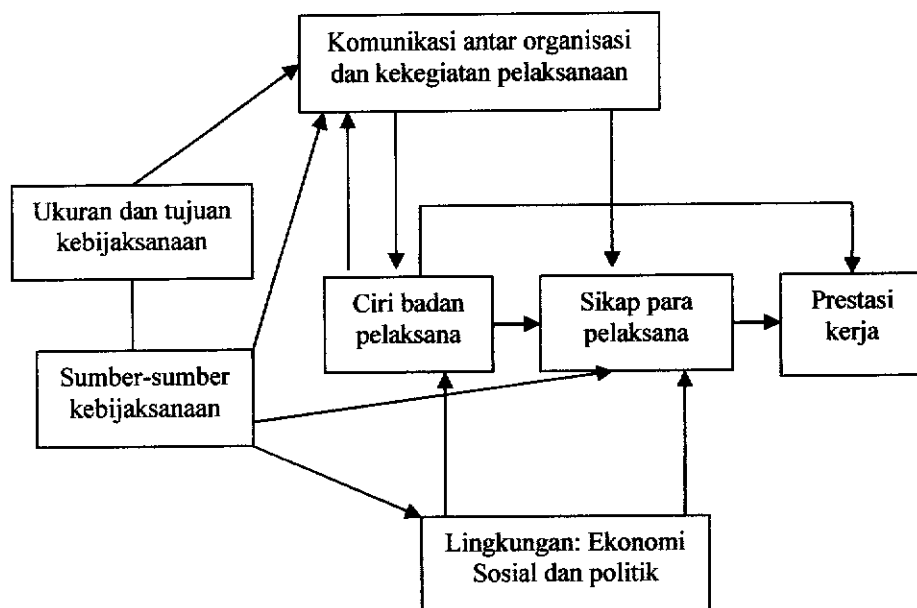
- 1) Menurut **Hogwood dan Gounn** untuk dapat mengimplementasikan kebijaksanaan Negara secara sempurna (*Perfect implementation*) maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu.

Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut:

- a) Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan atau kendala yang serius
- b) Untuk pelaksanaan program tersebut tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup mandiri
- c) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia
- d) Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kualitas yang handal
- e) Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
- f) Hubungan saling ketergantungan harus kecil
- g) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
- h) Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat
- i) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna
- j) Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna

- 2) **Fan Meter dan Fan Hornt** dalam teorinya ini beranjak dari suatu argumen bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijaksanaan yang dilaksanakan

Gambar 1.1 Model proses implementasi kebijaksanaan



Sumber : D.S. Van Meter and Van Horn, The Policy Implementation Process: A conceptual Freemanwork, Administrasi and Society, 1975, Hal 445-448

Gambar struktur atau pola kerja diatas menjelaskan tentang system atau proses dimana implementasi dirancang dan diterapkan pada tingkatan teknis dilapangan. Secara deskriptif komuniaksi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan merupakan ciri dari badan pelaksana dimana dapat dijadikan sebagai ukuran dan ukuran kebijaksanaan yang merupakan sebagai sumber-sumber kebijakan, atau sebaliknya setelah melalui sebuah tahapan atau kajian komunikasi antar oragnisasi dan kegiatan pelaksanaan dapat

juga sebagai ciri badan pelaksana setelah menerima masukan, dan merupakan sebagai salah satu sikap pelaksana, yang akhirnya menjadi sebuah prestasi kerja, dalam pola kerjanya ada saling berhubungan antara ciri badan pelaksana, sikap para pelaksana, dan prestasi kerja, adapun tanpa melalui sikap para pelaksana dalam menerapkan kebijakan ciri badan pelaksana dapat langsung dikatakan prestasi kerja, semua ini tidak terlepas masukan sektor lingkungan, ekonomi, sosial, dan politik yang merupakan sumber-sumber dari kebijaksanaan dan dapat dikatakan sebagai sikap para pelaksana setelah menganalisa semua permasalahan yang timbul dan terjadi.

- 3) Model yang dikembangkan oleh **Daniel Mazmania** dan **Paul A. Sabatier**, yang disebut *A Frame Work For Implementation Analysis* (kerangka analisis implementasi), kedua ahli ini berpendapat bahwa peran penting dari analisis implementasi kebijaksanaan Negara ialah mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi.⁷

Dari ketiga Model-model implementasi diatas yang akan digunakan adalah yang ke tiga karena dalam proses implementasinya mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya

⁷ Solihin Abdul Wahap, Dr. MA *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi dan Implementasi Kebijakan Negara* PT. Bumi Aksara, Jakarta. Hal. 59-82

tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasinya beserta faktor-faktor yang akan mendukung dalam pelaksanaannya.⁸

Suatu implementasi tentunya mempunyai tujuan untuk memperoleh keberhasilan, tercapainya atau tidaknya suatu tujuan dari implementasi suatu program itu sangat tergantung bagaimana adanya faktor-faktor pendukung. Faktor-faktor pendukung itu ada yang terlibat dan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Yang dimaksud dengan faktor-faktor pendukung itu adalah :

- (a) Tersedianya waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai
- (b) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar memadai
- (c) Hubungan ketergantungan harus kecil
- (d) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
- (e) Tugas-tugas terperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat
- (f) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna
- (g) Kebijakan yang akan diimplementasikan di dasari oleh suatu kualitas yang handal

Implementasi kebijakan yang operasionalnya adalah program, dalam prosesnya terhadap dua unsur pendukung yang penting dan mutlak yaitu adanya : (1) Program yang dilaksanakan, (2) Target group, yaitu kelompok yang menjadi sasaran penerima manfaat program dan (3) unsur

⁸ Solihin Abdu Wahab Dr. MA. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. PT. Bumi Aksara, Jakarta, Juli, hal 59-82

pelaksana, yaitu organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengawasan proses implementasi tersebut.⁹

Setiap implementasi dikatakan berhasil jika mencapai tujuan yang diharapkan atau memperoleh hasil. Karena pada prinsipnya suatu kebijaksanaan dibuat adalah untuk memperoleh hasil. Karena pada prinsipnya suatu kebijaksanaan dibuat adalah untuk memperoleh hasil yang diinginkan yang dapat dinikmati atau dirasakan oleh masyarakat.

Efisiensi pelaksanaan kebijakan berkaitan dengan keseimbangan antara biaya atau dana yang dikeluarkan, waktu pelaksanaan, sumber daya manusia yang digunakan dan kualitas pelaksanaan kebijakan. Keputusan kelompok sasaran inilah yang memberikan nilai arti pada pelaksanaan program karena kelompok sasaran inilah yang terkena dampak langsung dari program yang dilaksanakan.

Tetapi terkadang proses pelaksanaan suatu kebijakan itu tidak selalu mencapai keberhasilan dan sebagaimana tertuang dalam rumusan kebijakan dan sering timbul semacam pertanyaan tentang sebab-sebab timbulnya kegagalan tersebut. Kegagalan dari pelaksanaan kebijakan itu dan sangkut pautnya dengan isi kebijakan yang harus dilaksanakan serta pembagian potensi yang ada.

Isi kebijakan yang menyebabkan kegagalan dari suatu pelaksana kebijakan terjadi karena samar-samarnya isi dari kebijakan, dalam arti tujuan-tujuan tidak terperinci. Hal ini akan mengakibatkan kurangnya

⁹ Abdullah M Syukur. *Perkembangan Penerapan Studi Implementasi*, Pusdiklat Pegawai Negeri RI, Lembaga Administrasi Negara Jakarta, 1998. hal 52

pegangan bagi pelaksana, yang akan memperbesar kemungkinan perbedaan pandangan dari isi kebijakan.

Selain itu kebijakan yang hendak dijalankan ada kalanya bertentangan dengan kebijakan yang yang lain. Yang merupakan salah satu sebab dari suatu pelaksanaan kebijakan yang tidak berhasil, yaitu terletak pada kurangnya sumber-sumber pendukung antara lain : waktu, uang dan ahli.

Mengenai berhasil atau tidaknya pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pembagian potensi di antara aktor-aktor yang terlibat, struktur dari organisasi pelaksana dapat juga mengakibatkan masalah. Hal ini terjadi apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

Amir Santoso mengutip pendapat Van Meter dan Van Horn tentang variabel-variabel yang membentuk kaitan antara kebijakan dan hasilnya. Variabel-variabel tersebut adalah ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, aktifitas komunikasi antar organisasi dan aktifitas pelaksanaan, karakteristik dari agen pelaksana, kondisi sosial politik dan ekonomi, disposisi dari pelaksana dan penyelenggaraannya.¹⁰

Menurut Edward 3 dasar uraian tersebut dapat disimpulkan dalam pelaksanaan suatu kebijakan harus memperhatikan faktor-faktor yang

¹⁰ Amir Santoso, *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*, Rineka Cipta Jakarta, 1990, hal 9

memungkinkan tujuan dan maksud pelaksanaan kebijakan tersebut dapat tercapai.¹¹ Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

a. Komunikasi

Tersedianya komunikasi adalah berkaitan dengan perintah untuk melaksanakan kebijakan terutama bagi aparat pelaksana sehingga akan diketahui apa yang harus dilaksanakan.

b. Sumber Daya

Sumber daya merupakan dana atau intensif lain yang akan mengefektifkan pelaksanaan kebijakan.

c. Disposisi/sikap pelaksana

Sikap pelaksana yang akomodatif merupakan syarat yang diperlukan untuk lancarnya suatu proyek.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan sehingga struktur birokrasi ini harus jelas.

2. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup meliputi lingkungan fisik di sekitar, atau habitat-habitat dari organisme, dan yang kaitannya dengan ekosistem baik flora dan fauna baik dikehidupan air maupun darat yang selalu berproses secara berskala untuk mempertahankan generasi maupun mempertahankan kehidupan dari faktor yang merusak kehidupan ekosistem.

¹¹ Ibid

Persoalan lingkungan mencakup dua hal, yakni pencemaran dan perusakan lingkungan (Pasal 1 butir 7 dan 8 UULH).¹² Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi dan komponen lain ke dalam lingkungan dan berubahnya tatanan lingkungan turun. Perusakan lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tindakan langsung terhadap sifat-sifat fisik dan hayati lingkungan yang mengakibatkan lingkungan itu kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan. Untuk selanjutnya tulisan ini mencakup permasalahan lingkungan yang diakibatkan oleh eksploitasi sumber daya alam.

Pengelolaan lingkungan merupakan salah satu tugas penting pemerintah dalam hal memberikan pelayanan keamanan dan kesehatan masyarakat. Dampak negatif dari kerusakan atau pencemaran lingkungan menyebabkan meningkatnya penyakit-penyakit lingkungan, yang lebih lanjut berakibat pada tercurahnya dana masyarakat untuk memulihkan kesehatan mereka. Respon yang bersifat organisasional yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah mengeluarkan kebijakan umum tentang lingkungan hidup dan diikuti dengan diundangkannya peraturan perundang-undangan serta pembentukan organisasi lingkungan hidup, baik ditingkat pusat maupun daerah.¹³

Dalam UUPH menyempurnakan tentang perumusan pengelolaan lingkungan hidup pada pasal 1 angka 2 UUPH bahwa :

¹² Ninie Suparni, *Pengelolaan Dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta, Sinar Grafika, 1992, hal 39-40

¹³ Achmad Nurmandi Drs, M. Sc. *Manajemen Perkotaan*. Juli. 1999. hal 261

“Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup”

Berdasarkan perumusan pengelola lingkungan hidup di berikan kebijakan bagi pengelolaan pada “melestariakan fungsi lingkungan hidup”. Yang dalam ketentuan sebelumnya tidak kita jumpai, sedangkan 7 aktivitas lainnya, yaitu penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup hanya di lihat sebagai langkah.¹⁴

3. Pencemaran Sungai

Pencemaran sungai merupakan faktor yang penting dalam kehidupan, namun dengan meningkatnya pembangunan fisik kota dan pusat-pusat industri, kualitas air telah mengalami perubahan. Air yang dulunya bersih, kini keruh dan kotor.

Perubahan lingkungan air pada umumnya disebabkan pencemaran air, yaitu masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Pembangunan fisik kota dan pusat-pusat industri disertai dengan melonjaknya limbah dan sampah rumah tangga yang berada disekitar daerah aliran sungai, yang merupakan salah satu sumber penyebab pencemaran sungai.

¹⁴ Rachmadi Usman, S.H. *Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasional*. Bandung 2003 hal 53

Pembahasan ini bertujuan untuk mengetahui gambaran secara umum tentang sungai dan permasalahannya serta mengetahui tentang upaya-upaya dalam pengendalian air. Untuk mengetahui tujuan tersebut, bahasan dibagi ke dalam 3 kelompok yaitu.

1) Sumber Pencemaran air

Sumber pencemaran dapat merupakan kegiatan yang bersifat alami (natural) dan kegiatan antropogenik. Pencemaran sungai akibat kegiatan industri besar dan industri rumah tangga yang sangat penting adalah limbah yang dihasilkan oleh industri tersebut tanpa adanya pengolahan limbah, yang kemudian dilakukan pembuangan di sekitar sungai, selain itu sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga dengan pembuangan di sekitar daerah aliran sungai. Pada umumnya bahan-bahan buangan industri secara langsung disalurkan kedalam sungai yang berada disekitarnya. Jarang yang menyalurkan kedalam tanah mengikuti aliran air tanah. Pencemaran ini sangat mengganggu kehidupan makhluk hidup disekitarnya.

Meluapnya aliran sungai disebabkan dua hal yaitu: Pembuangan sampah ke alur sungai yang menyebabkan penyumbatan aliran sungai dan penyempitan alur sungai oleh bangunan penduduk

2) Dampak pencemaran sungai

Salah satu dampak pencemaran sungai adalah sulitnya mendapatkan air bersih disekitar Daerah Aliran Sungai, sebagai akibatnya dari pencemaran limbah perusahaan/industri dan limbah rumah tangga.

Akibatnya penyediaan air untuk keperluan hidup makin menjadi masalah.

Dampak lainnya dari pencemaran sungai adalah banjir. Banjir yang terjadi di wilayah Kota Bandar Lampung beberapa tahun terakhir ini telah menjadi pandangan rutin. Artinya banjir selalu terjadi pada setiap musim hujan dan setiap hujan turun yang mencapai waktu tiga jam. Banjir tersebut secara umum disebabkan oleh meluapnya sungai yang mengalir di wilayah Kota Bandar Lampung.

Dampak banjir yang terjadi di Kota Bandar Lampung dapat berupa dampak negatif secara fisik dan sosial ekonomi. Secara fisik yaitu terjadi kerusakan pada prasarana kota dan menyebabkan terjadinya lingkungan kota yang tidak sehat. Kerusakan karena dampak ini menyebabkan kerugian besar pada pemerintah dan masyarakat.

3) Penanggulangan pencemaran air

Upaya penanggulangan pencemaran air dapat dilakukan melalui:

a) Penelitian dan Pemantauan

Penanggulangan pencemaran air perlu mempertimbangkan keserasian antara faktor-faktor sumber pengaruh atau dampak, kondisi sosial, ekonomi dan politik serta melakukan pengukuran lapangan sesuai dengan kondisi.

Langkah pertama dalam penanggulangan pencemaran air adalah dengan melakukan pengkajian atau identifikasi mengenal macam sumber, model dan pola penyebaran serta pengaruh dan dampak.

Langkah selanjutnya adalah mengetahui dan mengkomunikasikan tentang pentingnya pengelolaan pencemaran air dengan mempertimbangkan keadaan sosial lingkungannya, yang berhubungan dengan demografi, kondisi sosial ekonomi, juga perlunya dukungan politik, baik dari segi hukum, peraturan, kebijakan maupun administrasi untuk melindungi pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan pengawasan.

b) Peraturan Perundangan

Peraturan perundangan dalam kaitannya dengan upaya penanggulangan pencemaran sungai adalah Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 104 tahun 1999 tentang Baku Mutu Limbah Cair. Sebelum dikeluarkan Surat Keputusan tersebut, bentuk Keputusannya bersifat sektoral sesuai dengan kewenangan dari instansi atau departemen dalam pengelolaan kegiatan yang bernaung dibawahnya. Adapun bentuk peraturan tersebut berupa peraturan, instruksi atau keputusan menteri untuk tingkat pusat atau departemen, sedangkan untuk tingkat daerah berupa peraturan daerah atau keputusan atau instruksi Gubernur.

c) Teknologi Penanggulangan Pencemaran

Usaha pengendalian pencemaran perlu dilengkapi dengan usaha tehnik penanggulangan agar dapat memenuhi tugasnya. Untuk itu diperlukan teknologi penanggulangan pencemaran yang baku sesuai dengan perkembangan teknologi yang terus meningkat pula

upaya penanggulangan pencemaran air dari segi teknologi pada prinsipnya mencakup dua masalah yaitu pengendalian dan pengawasan lingkungannya.

E. DEFINISI KONSEPTUAL

Adalah bahwa dalam tahapan ini berusaha menjelaskan pengertian suatu konsep dengan konsep lain yaitu :

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah, individual ataupun kelompok, yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam keputusan. Termasuk didalamnya adalah upaya menstranportasikan keputusan ke dalam tahap operasional untuk mencapai perubahan besar maupun kecil seperti yang telah ditetapkan dalam keputusan tersebut.

2. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup meliputi lingkungan fisik disekitar, atau habitat dari organisme, dan yang kaitannya dengan ekosistem baik flora maupun fauna baik di lingkungan air maupun darat yang selalu berproses secara berskala untuk mempertahankan generasi ataupun mempertahankan dari kehidupan dari faktor yang merusak kehidupan ekosistem.

3. Pencemaran Sungai

Intensitas pencemaran sungai yang ditimbulkan oleh kegiatan-kegiatan industri mempunyai kecendrungan yang meningkat dengan

perkembangan industri. Hal ini dilakukan untuk mengetahui mendalam karakteristik sumber-sumber utama penyebab menurunnya kebijakan tentang kualitas air di sekitar daerah aliran sungai, serta untuk mengetahui pilihan kebijakan dalam penanggulangan.

F. DEFINISI OPERASIONAL

Suatu penelitian dapat diukur maka variabelnya perlu dioperasikan. Dengan membaca definisi operasional dalam suatu penelitian, seorang peneliti akan mengetahui pengukuran suatu variabel, sehingga peneliti dapat mengetahui baik buruknya pengukuran. Tolak ukur dalam penelitian ini tentang implementasi surat keputusan Gubernur Lampung tentang Baku Mutu Limbah Cair dalam menanggulangi pencemaran air sungai.

1. Isi Kebijakan Pemerintah Mengenai Pencemaran Sungai

- 1) Peraturan Pemerintah tentang pencemaran sungai
- 2) Keputusan Gubernur Lampung mengenai pencemaran sungai
- 3) Aturan perundang-undangan lainnya

2. Proses Implementasi Kebijakan

a. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh BAPEDALDA, akan diukur melalui indikator-indikator:

- 1) Proses pelaksanaan lembaga pemerintah di bidang lingkungan hidup pada pencemaran sungai di kota Bandar Lampung
- 2) Tingkat kualitas pencemaran sungai setelah kebijakan diimplementasikan

- 3) Perubahan perilaku masyarakat dan BAPEDALDA dalam kaitannya dengan pelaksanaan implementasi kebijakan pemerintah dibidang lingkungan hidup pada penanganan pencemaran sungai
- b. Variabel-variabel yang diduga mempengaruhinya dijabarkan sebagai berikut :
- 1) Komunikasi
 - a) Kejelasan dalam memberikan perintah kepada aparat pelaksana untuk melaksanakan kebijakan dan koordinasi
 - b) Konsistensi dalam pemberian perintah pelaksana kebijakan
 - c) Tak adanya konflik dalam perbedaan diantara aparat pelaksana dalam melaksanakan kebijakan
 - 2) Sumber Daya diukur dalam indikator
 - a) Tersedianya sumber-sumber yang diperlukan dalam pelaksanaan program
 - b) Perpaduan diantara sumber-sumber yang diperlukan dalam pelaksanaan program
 - 3) Disposisi/sikap pelaksana diukur dengan indikator
 - 1) Pengetahuan dan kemampuan yang cukup dari aparat pelaksana untuk melaksanakan kebijakan
 - 2) Keinginan yang besar dari aparat pelaksana untuk melaksanakan kebijakan yang benar

c. Kondisi Lingkungan

Kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kota Bandar Lampung yang ikut mempengaruhi sikap terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan pencemaran sungai.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan penjelasan yang bersifat kualitatif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek, suatu satuan kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu peristiwa.¹⁵

Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tetap sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat.

Adapun penjelasan yang bersifat kualitatif adalah data yang muncul berwujud kata-kata yang disusun ke dalam suatu teks yang diperluas dan bukan berupa rangkaian angka.¹⁶

Dalam studi ini penelitian berusaha menggambarkan tentang gejala yang terjadi di masyarakat sehubungan dengan terjadinya pencemaran di daerah aliran sungai dan dari data-data yang akan dikumpulkan di

¹⁵ Nasir Moh, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), Hal. 63

¹⁶ Miles Mathew B, *Analisis Data Kuantitatif* (Jakarta: UI Press, 1992), Hal. 15

lapangan akan disusun suatu kesimpulan tentang hasil dari implementasi kebijakan tersebut di masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDALDA) Bandar Lampung karena merupakan badan yang menanggulangi dampak pencemaran sungai yang merupakan salah satu daerah yang mendapat pencemaran air sungai

3. Jenis Data

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh dari keterangan pihak-pihak yang kompeten atau terkait dengan masalah yang ada, dalam penelitian ini, pihak-pihak yang dimaksud adalah: BAPPEDA, BAPEDALDA.

Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan menjadi sumber data primer akan diwawancara secara mendalam guna mendapatkan data-data tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperlukan oleh peneliti untuk melengkapi data primer yang didapat. Data sekunder berupa buku pedoman dan arsip-arsip yang berkenaan dengan pelaksanaan Kebijakan AMDAL dan Pencemaran Sungai.

c. Unit Analisis Data

1) BAPEDALDA

Kepala bidang laboratorium BAPEDALDA Tingkat I, karena ikut dalam pembuatan rencana strategis bersama Pemerintah Kota Bandar Lampung dan paling mengetahui tentang permasalahan pencemaran sungai.

- 2) Masyarakat sekitar Daerah Aliran Sungai Way Belau sebanyak 15 Kepala Keluarga
- 3) Kepala Seksi Pemantauan Dan Pemulihan
- 4) Kepala Pengawasan Dan Pengendalian

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini digunakan tiga teknik meliputi :

a. Wawancara

Teknik ini dipergunakan untuk mendapatkan informasi secara lisan dari para informan yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini akan dilakukan wawancara awal dengan keseluruhan informan, dari wawancara awal dapat dijadikan landasan untuk kemudian melakukan secara luas dan mendalam mengenai segala sesuatu informasi dengan mengajukan Tanya jawab atau percakapan secara langsung berdasarkan daftar pertanyaan sebagai panduan kepada informan.

b. Observasi

Teknik observasi ini dipergunakan untuk memperoleh gambaran tempat penelitian, sejarahnya, keadaan penduduk dan pendapatnya tentang pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan teknik ini adalah dengan

cara peneliti turun langsung ke dalam lingkungan subyek untuk membuat catatan lapangan yang dikumpulkan secara sistimatis.

c. Dokumentasi

Melalui teknik ini peneliti mempelajari berbagai sumber data melalui laporan hasil penelitian, catatan, buku, agenda, surat kabar dan majalah. Tujuannya adalah untuk mencari kebenaran ilmiah secara umum sebagai landasan berpijak dalam menganalisa data dan menjawab permasalahan yang diajukan.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan analisis data yang telah dikembangkan oleh *Miles dan Huberman*, sedangkan prosedur analisis datanya sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerdehanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dalam reduksi data tersebut segala data baik primer maupun sekunder diarahkan pada fokus penelitian.

b. Penyajian Data

Batasan yang diberikan oleh Miles dan Huberman dalam penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang sering digunakan pada data kualitatif pada masa yang lalu dalam bentuk naratif. Penyajian teks naratif terkadang melebihi kemampuan manusia dalam proses informasi dan menggerogot kecenderungan mereka untuk menemukan pola yang sederhana. Kecenderungan kognitifnya, manusia akan menyederhanakan informasi yang kompleks kedalam bentuk yang disederhanakan dan selektif atau konfigurasi yang mudah dipahami. Selanjutnya Miles dan Huberman menyederhanakan bentuk penyajian data berupa teks naratif tersebut dengan menawarkan pola penyajian data yang lebih sederhana meliputi berbagai jenis matriks, grafik jaringan dan bagan.

c. Menarik Kesimpulan Dan Vertifikasi

Dari permulaan pengumpulan data seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat dan proposisi. Peneliti yang berkompeten akan menangani kesimpulan-kesimpulan itu dengan longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Kesimpulan-kesimpulan ini juga divertifikasi selama penelitian berlangsung. Vertifikasi dilakukan sebagai tinjauan ulang

pada catatan-catatan lapangan atau dengan cara bertukar pikiran dengan dosen pembimbing. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohan dan kecocokannya.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dalam penyusunan skripsi ini dibagi dalam empat bab. Secara garis besar diuraikan sebagai berikut.

BAB I : Dalam bab satu ini, yakni bab pendahuluan, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka dasar teori, metodologi, defenisi konseptual, defenisi operasional, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : Selanjutnya dalam bab dua menyajikan deskripsi tentang kota Bandar Lampung serta kantor BAPEDALDA dalam menanggulangi pencemaran sungai.

BAB III : Merupakan bab analisa yang menjelaskan tentang implementasi kebijakan pemerintah kota Bandar Lampung dalam menanggulangi pencemaran sungai, dengan indikator implementasi yaitu kebijakan cara pengolahan limbah dan upaya penanganan, peraturan perundangan, dan kebijaksanaan.

BAB IV : Bab empat adalah bab kesimpulan yang memuat tentang kesimpulan atau summary dari diskusi pada bab-bab sebelumnya. Juga, saran-saran yang akan menjadi masukan dimuat dalam bab ini.